



LAPORAN TATA KELOLA
PD BPR PK BALONGAN
TAHUN 2020

Kantor Balongan :
Jl Raya Sukaurip 30 Balongan
Kabupaten Indramayu 45217 Jawa Barat
Telepon : (0234

Indramayu, 20 April 2021

No. : 65./BPR BLG/IV/2021
Lamp : 1 Sheet
Perihal : Laporan Tata Kelola PD BPR PK Balongan Tahun 2020

Kepada :

Yth. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan
Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.133, Cirebon

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Bank dan untuk memenuhi kewajiban pelaporan sesuai POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), berikut kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR PK Balongan tahun 2020.

Demikian Laporan ini kami sampaikan agar menjadi maklum.

PD BPR PK Balongan



Muhandar, SE
Direktur

Tanda terima Kirim Laporan

Tata Kelola th 2020.

tgl kirim 29-04-2021

 251700003278921		Tanggal : 29-04-2021 09:40 No. Pelanggan : 10953800 Deskripsi : DOKUMEN Berat : 1.0 Kg, Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp12,000.- Kota Tujuan : Kesambi, Cirebon Asuransi : Tidak Diantar maks. : 30-04-2021
	Pengirim : PD BPR PK BALONGAN Penerima : PIMPINAN OTORITAS JASA KEUANGA	
YES		

Untuk informasi dan pengecekan status kiriman silahkan kunjungi www.jne.co.id

Indramayu, 29 April 2021

No. : 072/SDin/BPR BLG/IV/2021
Lamp : 1 Sheet
Perihal : Laporan Tata Kelola PD BPR PK Balongan Tahun 2020

Kepada :

Yth. Ketua DPP Perbarindo
Rumah Perbarindo
Jl. Jendral Ahmad Yani By Pass Cempaka Putih
Jakarta Selatan

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Bank dan untuk memenuhi kewajiban pelaporan sesuai POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkerditan Rakyat (BPR), berikut kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR PK Balongan tahun 2020.

Demikian Laporan ini kami sampaikan agar menjadi maklum.

PD BPR PK Balongan



Munandar, SE
Direktur

DAFTAR ISI

Surat Pengantar	ii
PENGANTAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA	2
C. HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESMENT</i>)	2
BAB II	3
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	3
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	5
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)	6
B. Kepemilikan Saham Direksi	7
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	7
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	8
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	8
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	8
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	8
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	9
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
F. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	9
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	9

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	10
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	10
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	10
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	10
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	11
I. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	11
J. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi.....	12
K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	12
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	12
BAB III.....	13
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT DAN AUDIT EKSTERNAL	13
SERTA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO	13
A. FUNGSI KEPATUHAN.....	13
B. FUNGSI AUDIT INTERNAL.....	14
C. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL	15
D. MANAJEMEN RISIKO.....	15
BAB IV.....	17
PENGELOLAAN KEUANGAN.....	17
A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)	17
B. RENCANA BISNIS BANK.....	17
1. Penghimpunan Dana	17
2. Penyaluran Dana	17
3. Sumber Daya Manusia.....	18
4. Rencana Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja Bank	18
5. Jaringan Kantor dan Rencana Pengembangan / Perubahan Jaringan Kantor	18
C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	18
1. Laporan Transparansi Kondisi Keuangan BPR PK Balongan, meliputi :	18
2. Transparansi Laporan Non Keuangan, BPR PK Balongan sudah melakukan :	19
BAB V.....	20
HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA	20

PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat .

Selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPR PK Balongan dan digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui kinerja Bank, serta untuk meningkatkan pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR PK Balongan Tahun 2020 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

BAB III FUNGSI PEJABAT EKSEKUTIF

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

BAB V HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Berikut penjabaran untuk masing-masing BAB.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin meluasnya pelayanan dan meningkatnya volume usaha pada BPR PK Balongan, maka semakin meningkat pula risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga Penerapan Tata Kelola Bank yang sehat menjadi hal penting untuk saat ini dan masa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh BPR akan semakin meningkat.

Penerapan Tata Kelola juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan BPR PK Balongan terhadap konsumen, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan Tata Kelola BPR PK Balongan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Salah satu bentuk implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dengan pelaporan BPR PK Balongan kepada OJK dalam bentuk Laporan Tata Kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (*transparency*), adalah Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) , yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Dasar hukum penyusunan Laporan Tata Kelola BPR PK Balongan mengacu kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Peraturan OJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK BPR)
3. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
4. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

C. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

Sejalan dengan ketentuan Bab VI Pasal 2 SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, BPR PK Balongani melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, yang terdiri atas :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : MUNANDAR, SE
	NIK *) :
	Jabatan : Plt Direktur Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan melaksanakan rencana strategis BPR PK Balongan baik jangka pendek maupun jangka panjang; - Menjaga eksistensi keberlangsungan dan pengembangan usaha BPR PK Balongan sesuai ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; - Menjalankan program kerja/ bisnis plan yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemilik; - Menyusun Rencana Bisnis Bank bersama Direksi yang lain dan memberikan usul kepada Dewan Pengawas untuk disahkan oleh Pemilik; - Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan pembinaan atas kerja dan pengembangan perusahaan baik operasional maupun komersial secara professional; - Membuat, menyiapkan dan menyampaikan laporan-laporan kepada pemilik dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan usaha BPR PK Balongan; - Memastikan seluruh kegiatan operasional bank dalam mencapai target yang ditetapkan berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku - Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan/jenjang organisasi

2	Nama : MUNANDAR, SE
	NIK *) :
	Jabatan : Direktur
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan melaksanakan rencana strategis BPR PK Balongan baik jangka pendek maupun jangka panjang; - Menjaga eksistensi keberlangsungan dan pengembangan usaha BPR PK Balongan sesuai ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; - Menjalankan program kerja/ bisnis plan yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemilik; - Menyusun Rencana Bisnis Bank bersama Direksi yang lain dan memberikan usul kepada Dewan Pengawas untuk disahkan oleh Pemilik; - Melakukan pembinaan dan pengendalian unit kerja BPR; - Menjaga agar pelaksanaan operasional BPR sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal; - Mengambil keputusan strategis melalui pertimbangan yang matang sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja BPR; - Memastikan kegiatan bisnis BPR secara keseluruhan berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan; - Menjamin terwujudnya teamwork yang baik dan memberikan kesempatan training, upgrading bagi sub ordinate. - Melaksanakan penerapan tatakelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**) Rekomendasi Dewan Pengawas sudah ditindaklanjuti oleh Direksi</p>	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : Drs. H. DARMA, M.Si
	NIK *) :
	Jabatan : Ketua Dewan Pengawas
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin dan mengorganisasi semua kegiatan anggota Dewan Pengawas, termasuk menyusun program kerja memimpin rapat anggota Dewan Pengawas, menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas serta membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas; - Melaksanakan pengawasan terhadap BPR baik secara periodic atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; - Melakukan pengendalian, dalam bentuk pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya; - Melakukan pembinaan kepada Direksi dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga kelangsungan usaha PD. BPR PK BALONGAN; - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada PD BPR PK Balongan. - Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pemilik sebagai Pemilik PD. BPR PK BALONGAN melalui RUPS / RUPSLB atas keseluruhan kinerja PD. BPR PK BALONGAN.
2	Nama : H. WAHYUDI, SE
	NIK *) :
	Jabatan : Anggota Dewan Pengawas
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**)

- Melakukan sosialisasi RBB kepada seluruh jajaran/unit kerja sehingga target bisa dicapai pada waktunya;
- Menentukan skala prioritas dalam mencapai RBB dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan biaya;
- Membentuk Unit Yugas Khusus Penanganan Kredit Bermasalah.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

Karena modal inti BPR PK Balongan pada tahun 2020 masih kurang dari Rp.80M (Delapan Puluh Milyar Rupiah) BPR belum wajib membentuk Komite untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK)	Keahlian)	Komite***)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	-						
2							
dst							

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja :
	-
	Realisasi :
	-
	Jumlah Rapat :
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja :
	-
	Realisasi :
	-
	Jumlah Rapat :-
3	PE Kepatuhan
	Program Kerja :
	-
	Realisasi :
	-
	Jumlah Rapat :-

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1	Munandar, SE		-	-

*) NIK hanya disampaikan pada pelaporan OJK

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1	Munandar, SE		-	-	-

*) NIK hanya disampaikan pada pelaporan OJK

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai SE OJK mengenai Laporan Bulanan BPR

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Munandar, SE		-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Munandar, SE		-	-	-

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-	-

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 th)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji*)	2	872.440.140	2	348.976.058
2	Tunjangan	2	279.817.380	2	29.081.336
3	Tantiem				
4	Kompensasi Berbasis Saham				
5	Remunerasi lainnya**)				
	Total		1.152.257.520		378.057.397

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Mobil (1 unit)	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya*)	-	-

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah dalam Perbandingan

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,6 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Direksi yang terendah (b)	1,2 : 1
Rasio gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,2 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,5 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	8,7 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	13 Februari 2020	5	Evaluasi Kinerja BPR PK Balongan bulan Januari 2020
2	16 Maret 2020	5	Evaluasi Kinerja BPR PK Balongan bulan Februari 2020; Efektivitas kerja dalam merealisasikan RBB; Kepatuhan terhadap ketentuan dalam mewujudkan Tatakelola yang baik.
3	13 April 2020	6	Evaluasi Kinerja bulan Maret 2020; Penatakelolaan likuiditas; Penerapan Manajemen Risiko Melakukan antisipasi dalam menghadapi pandemic COVID-19
4	13 Mei 2020	6	Evaluasi Perkembangan BPR PK Balongan April 2020; Strategi dalam menghadapi pandemic COVID-19 - Pengelolaan likuiditas

			- Mitigasi risiko - Stimulus kredit - Evaluasi produk Langkah-langkah dalam menyikapi permasalahan di bidang kredit
5	17 Juni 2020	6	Evaluasi Kinerja Mei 2020; Revisi RBB; Rencana dan langkah strategis
6	13 Oktober 2020	5	Evaluasi Kinerja BPR PK Balongan bulan September; Langkah-langkah strategis dalam penanganan masalah BPR
7	10 Desember 2020	4	Kajian RBB tahun 2021
8	13 Desember 2020	4	Evaluasi Kinerja Bulan November dan langkah-langkah strategis dalam penanganan permasalahan BPR PK Balongan

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Drs. H. Darma, M.Si		√	-	100 %
2	H. Wahyudi, SE		√	-	100 %

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam Satu Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Pengawas		Pegawai Tetap		Pegawai Tdk tetap	
	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan
Total FrAud	-	-	-	-	-	2	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		1		-
Dalam Proses Penyelesaian Internal**)	-	-	-	-	-	1 Sedang di laksanakan penjualan aset yang diamankan	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya ***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak lanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	3
Dalam Proses penyelesaian	-	-
Total	-	3

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	30 Maret 2020	Sosial	Bantuan Covid-19 Jabar Bergerak	Masyarakat	Rp 15.000.000,-
2	24 April 2020	Sosial	Sumbangan Covid-19	Masyarakat	Rp 1.000.000,-
3	25 Agustus 2020	Sosial	Bantuan Rutilahu	Masyarakat	Rp 10.500.000,-

BAB III

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT DAN AUDIT EKSTERNAL SERTA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

A. FUNGSI KEPATUHAN

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Kepatuhan yang dibantu oleh seorang Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, namun pada bulan November 2020 Direktur utama berhalangan tetap karena meninggal dunia, sehingga BPR masih dalam proses pemenuhan anggota Direksi. Laporan Pokok Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah disusun dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2005 dengan tandatangan Direktur dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2021 pada BPR PK Balongan antara lain :

1. Menyusun ketentuan-ketentuan yang belum ada, diantaranya :
 - Pedoman dan Kebijakan Stimulus Kredit Dampak dari Penyebaran COVID-19;
 - Pedoman dan Kebijakan Team ALCO;
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas;
 - Pedoman dan Kebijakan Supervisi;
 - Ketentuan Penghargaan Financial bagi Pengelola dan Pengurus;
 - Ketentuan Layanan Jemputan (*pickup service*);
 - Ketentuan Pelanggaran Disiplin Pegawai;
 - Ketentuan Tata Tertib Pegawai.
2. Melakukan Penyesuaian terhadap Ketentuan-ketentuan yang sudah ada, yaitu :
 - Perubahan atas Pedoman dan Kebijakan Dana Pihak ke III (tabungan dan deposito);
 - Revisi atas Standart Operasional Prosedur (SOP);
 - Revisi atas suku bunga tabungan, deposito dan cash ratio;
 - Revisi atas suku bunga kredit.
3. Melakukan sosialisasi budaya kepatuhan kepada seluruh kantor cabang yang ada pada PD BPR PK Balongan.

B. FUNGSI AUDIT INTERNAL

BPR PK Balongan memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional, sehingga dapat bekerja secara objektif serta mampu mengungkapkan kejadian-kejadian yang ada pada BPR PK Balongan tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BPR.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Eksekutif Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas.

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaporkan mengenai Laporan Pokok Pokok Hasil Audit Intern BPR PK Balongan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2005.

1. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit dilakukan secara menyeluruh terhadap kegiatan operasional yang menitik beratkan diantaranya meliputi :

- a. Evaluasi Rencana Bisnis BPR (RBB Tahun 2020);
- b. Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP);
- c. Pola Kerja dan Disiplin Pegawai;
- d. Administrasi Akuntansi, Transaksi dan Pembukuan;
- e. Kepatuhan Terhadap Regulasi (OJK dan Pemerintah).

2. Audit yang telah dilaksanakan selama tahun 2020

No	TANGGAL	PELAKSANAAN AUDIT	KANTOR CABANG YANG DI AUDIT
1.	04 Februari 2020 S/D 14 Februari 2020	Audit Khusus dalam rangka investigasi 49 (empat puluh sembilan) rekening kredit pada Kantor Cabang Arah Kidul yang pemberian kreditnya tidak sesuai dengan ketentuan.	Kantor Cabang Arah Kidul
2.	13 April 2020 S/D 20 April 2020	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional Kantor Cabang Kroya.	Kantor Cabang Kroya
3.	05 Juni 2020 S/D 12 Juni 2020	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional Kantor Cabang Cantigi Kulon.	Kantor Cabang Cantigi Kulon
4.	13 Juli 2020 S/D 17 Juli 2020	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional Kantor Cabang Beber.	Kantor Cabang Beber.

5.	14 September 2020 S/D 16 September 2020	Audit Khusus dalam rangka Investigasi penyalahgunaan dana simpanan nasabah yang oleh oknum Pegawai.	Kantor Cabang Arah Kidul
6.	12 Oktober 2020 S/D 16 Oktober 2020	Audit Khusus perkreditan pada Kantor Cabang Utama Balongan.	Kantor Cabang Utama Balongan.
7.	21 Oktober 2020 S/D 27 Oktober 2020	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional Kantor Cabang Sukra.	Kantor Cabang Sukra
8.	09 Nopember 2020 S/D 13 Nopember 2020	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional Kantor Cabang Kuningan.	Kantor Cabang Kuningan
9.	23 Nopember 2020 S/D 27 Nopember 2020	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional Kantor Cabang Bongas.	Kantor Cabang Bongas
10.	14 Desember 2020 S/D 18 Desember 2020	Audit Khusus atas permintaan dari Dewan Pengawas untuk melaksanakan Audit pada Kantor Cabang Utama Balongan terkait rasio NIM (net Interest Margin) di kantor Cabang Utama yang tergolong kecil agar dapat dipastikan penyebabnya.	Kantor Cabang Utama Balongan

C. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka :

1. Laporan Keuangan Tahunan BPR PK Balongan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten dan professional;
2. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang terdaftar di OJK/Bank Indonesia, yang ditunjuk sesuai dengan keputusan RUPS melalui Dewan Pengawas.

D. MANAJEMEN RISIKO

BPR PK Balongan memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi operasional dan bertanggungjawab langsung terhadap Direktur Kepatuhan. Tanggung jawan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko adalah memastikan bahwa BPR PK Balongan telah melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dalam

penyelenggaraan kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Perundang-undangan yang lain.

1. Tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yaitu :

- Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional
- Melakukan pengkajian terhadap usulan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru;
- Menyampaikan rekomendasi kepada satuan kerja/pegawai yang menangani fungsi operasional, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko dan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lain yang berhubungan dengan BPR.

2. Aktivitas kerja Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko pada tahun 2020 adalah :

- a. Melakukan kajian Manajemen Risiko terhadap Ketentuan baik ketentuan yang baru maupun ketentuan yang sudah ada diantaranya:
 - Kajian terhadap draft MoU BPR PK Balongan dengan notaris;
 - Kajian terhadap draft Revisi Ketentuan Waktu Kerja Pegawai;
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya penerapan Manajemen Risiko dalam setiap aktivitas operasional BPR PK Balongan;
- c. Menyusun Laporan Profil Risiko dan menyampaikan kepada Diretur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko/ Direktur Kepatuhan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lain yang berhubungan dengan BPR.
- d. Melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap Risiko Kridit (penyeban terjadinya kredit KL, D dan M)

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Selama tahun 2020 pada PD BPR PK Balongan tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dalam hal penyediaan dana bagi bagi pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.

B. RENCANA BISNIS BANK

1. Penghimpunan Dana

Melakukan strategi pemasaran produk Simpanan (tabungan dan deposito) kepada masyarakat melalui :

- a. Layanan Jemput bola;
- b. Menawarkan tingkat sukubungan yang kompetitif;
- c. Memberikan Layanan Prima Front Office;
- d. Strategi promosi melalui personal selling, brosur, media social dan penyelenggaraan event sehingga diharapkan produk bank bisa dikenal luas oleh masyarakat

2. Penyaluran Dana

- a. Meningkatkan Outstanding Kredit
 - Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dengan prosedur dan persyaratan kredit yang sederhana, fleksibel serta cepat dan suku bunga bersaing akan tetapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
 - Meningkatkan fungsi komite kredit sehingga dihasilkan keputusan kredit yang akurat;
- b. Penurunan Kredit Non Lancar (NPL)
 - Meningkatkan monitoring kredit dan pembinaan nasabah;
 - Mengoptimalkan penagihan;
 - Melakukan rescedulling bagi kredit yang masih bisa diselamatkan;
 - Mengefektifkan kerja tim Penyelesaian Kredit Bermasalah.

3. Sumber Daya Manusia
 - a. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai guna membangun loyalitas dan meningkatkan produktifitas;
 - b. Meningkatkan kopetensi Pegawai melalui pelatihan dan pendidikan;
 - c. Menambah tenaga kerja bagian pemasar (produk funding dan lending)
 - d. Mengaplikasikan, merespon, menindaklanjuti serta melakukan perbaikan atas berbagai temuan OJK yang berkaitan dengan manajemen SDM;
 - e. Memperbaiki dan meriview system internal dan prosedur operasional yang dapat menghambat /memperlambat pelayanan pada nasabah.
4. Rencana Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja Bank
Dengan menjaga liquiditas, memperbaiki perkreditan mulai dari kualitas kredit, penerapan SOP, memperbaiki kualitas SDM, menindaklanjuti hasil audit OJK, penyesuaian Teknologi Informasi dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
5. Jaringan Kantor dan Rencana Pengembangan / Perubahan Jaringan Kantor
Melakukan perubahan Struktur Kantor yang dulunya Kantor Pusat BPR Balongan dengan memisahkan kantor Pusat Balongan menjadi Kantor Pusat Non Operasional dan Kantor Cabang Utama.

C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka penyelenggaraan transparansi kondisi keuangan, BPR PK Balongan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 POJK Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

1. Laporan Transparansi Kondisi Keuangan BPR PK Balongan, meliputi :
 - a. Laporan Tahunan
 - Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR PK Balongan meliputi Profil Perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya;

- Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan harus audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia.
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- BPR PK Balongan telah membuat dan melaporkan secara rutin laporan keuangan publikasi triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya;
 - Laporan Publikasi telah ditempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi di kantor pusat BPR PK Balongan dan di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Kas.
2. Transparansi Laporan Non Keuangan, BPR PK Balongan sudah melakukan :
- a. Mengunggah tentang produk-pruduk yang ada pada BPR PK Balongan melalui media social (Instagram, facebook, dll)
 - b. Mengelola dan melaporkan seluruh Pengaduan nasabah kepada OJK.

BAB V

HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) BPR PK Balongan tahun 2020 pada peringkat Baik, dengan nilai komposit sebesar 2,82 (dua koma delapan puluh dua) Analisis terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. *Governance Structure* (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Tata Kelola sudah dilengkapi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

a. Kelengkapan Direksi dan jumlah Direksi;

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip Good Corporate Governance dan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan. Jumlah direksi 1 (satu) orang dikarenakan pada bulan November 2020 Direktur Utama berhalangan tetap (meninggal dunia) dan sedang dilakukan proses pemenuhan jumlah anggota Direksi.

b. Kelengkapan Dewan Pengawas dan jumlah Dewan Pengawas;

Komposisi Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan dan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah disetujui oleh RUPS.

c. Penunjukan Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatutan.

Dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatutan yang terpisah dari satuan kerja yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.

2. *Governance Process* (Proses Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank sehingga menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) bank.

Struktur dan infrastruktur tata kelola BPR PK Balongan telah tertuang dalam bentuk Manual. Penjabaran tugas dan tanggung jawab telah dituangkan dalam bentuk *job description* yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk mendukung terlaksana dan terciptanya Tata Kelola perusahaan yang baik serta menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

3. *Governance Outcome* (Hasil Penerapan Tata Kelola)

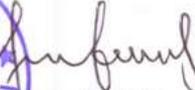
Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

BPR PK Balongan telah menerapkan prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaannya, seperti ketentuan mengenai BMPK dan transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan kepada public secara berkala.

Demikian Laporan ini kami susun, terimakasih.

Mengetahui/ Menyetujui
Dewan Pengawas


Drs. H Darma, MSi
Ketua


H Wahyudi, SE
Anggota



Indramayu, 20 April 2021

PD BPR PK Balongan

Direksi


Munandar, SE
Direktur



Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,59	0,43	-	0,31	0,33	0,31	0,08	-	0,28	0,23	0,27	2,82
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Faktor 1 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip Good Corporate Governance dan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan. Jumlah direksi 1 (satu) orang dikarenakan pada bulan November 2020 Direktur Utama berhalangan tetap (meninggal dunia) dan sedang dilakukan proses pemenuhan jumlah anggota Direksi.

Faktor 2 : Komposisi Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan dan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah disetujui oleh RUPS.

Faktor 4 : Bank telah mempunyai kebijakan tentang benturan dan kepentingan

Faktor 5 : Anggota Direksi yang melaksanakan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama dan sudah tidak menangani penyaluran dana, namun pada bulan November 2020 Direktur Utama berhalangan tetap (meninggal dunia) dan bank sedang

Faktor 6 : Sudah mempunyai pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan, Manajemen Risiko dan fungsi audit intern, yang terpisah dari satuan kerja yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.

Faktor 7 : Laporan Keuangan BPR telah diaudit oleh Audit Ekstern yang terdaftar pada OJK

Faktor 9 : Kebijakan dan sisdur pemberian kredit kepada pihak terkait sudah ada dalam pedoman Kebijakan Perkreditan dan tidak terjadi pelanggaran maupun pelanggaran BMPK, dan tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran yang dilakukan selama tahun 2020

Faktor 10 : Rencana strategis bank yang dijabarkan telah sesuai dengan visi dan misi bank, termasuk rencana penyelesaian permasalahan yang ada dan telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas

Faktor 11 : Transparansi Kondisi keuangan Cukup transparan, namun membutuhkan perbaikan sistem untuk dapat mendapatkan data yang cepat dan akurat